

RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2019 - 2023



DINAS PERINDUSTRIAN PROV. SULAWESI SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance) harus merupakan komitmen yang kuat dari seluruh domain yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah berada pada posisi sentral dan penting perannya. Pemerintah Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan kinerja yang baik.

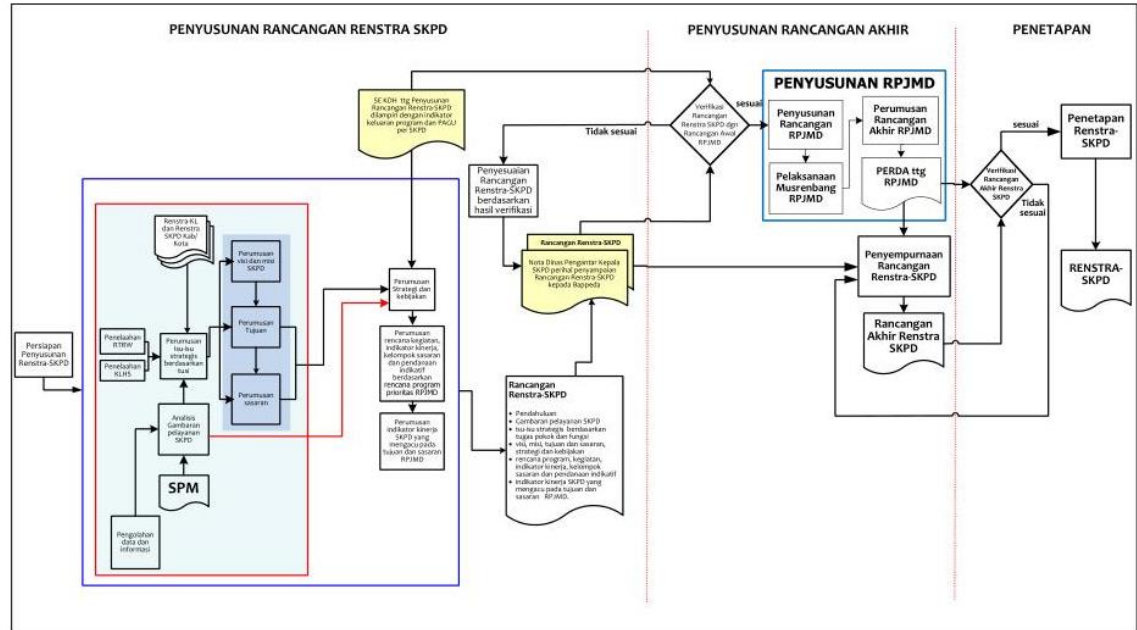
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Mengingat tantangan yang dihadapi kedepan akan semakin berat dan kompleks, diperlukan interkoneksi peran dan fungsi ketiga unsur/domain tersebut dalam konsepsi manajemen strategik dan implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip; akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), aturan hukum (*rule of law*), keadilan (*fairness*) dan partisipasi (*participation*). Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus segera direspon secara proaktif melalui penerapan manajemen perubahan yang visioner dan pembelajaran kolektif terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Semangat untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, dituangkandalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Di dalam Undang-Undang tersebut terikat pada 7 (tujuh) asas yang menjadi landasan serta orientasi bagi para penyelenggara pemerintahan, yakni ***asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, orientasi pada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas serta akuntabilitas.***

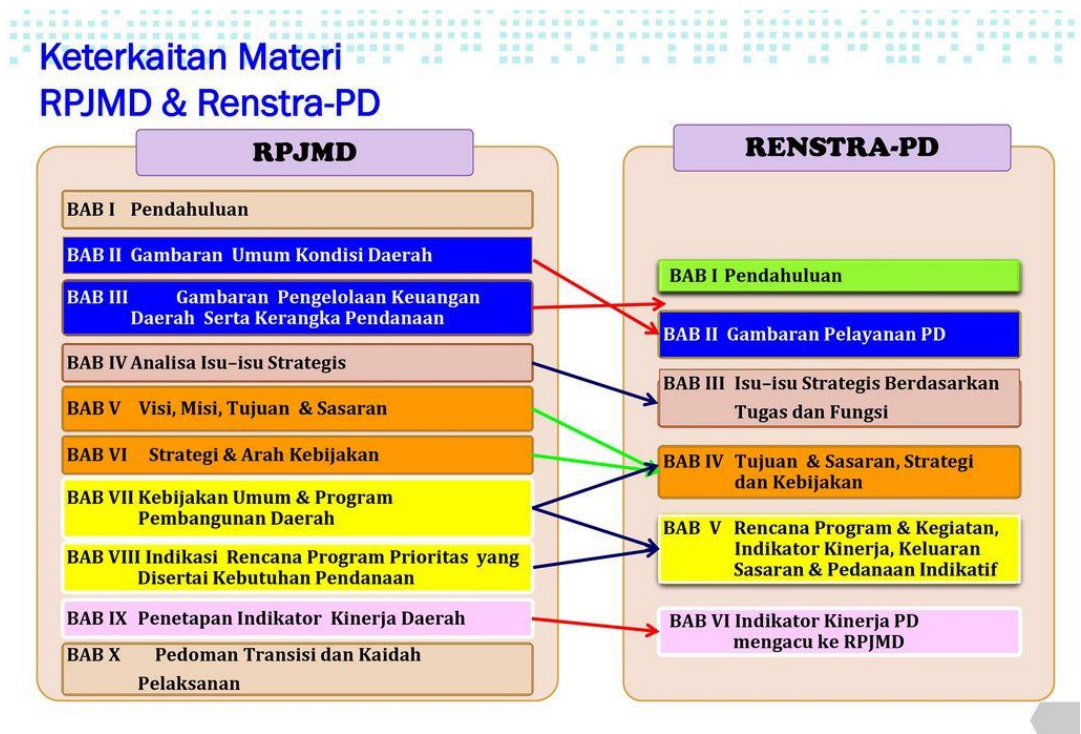
Analisis capaian kinerja/ permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 - 2023.

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan memedomani Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang kedudukan, susuna organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2019 -2023 dengan menjabarkannya kedalam dokumen perencanaan SKPD dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 -2023 yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dengan demikian Renstra ini menjadi dasar penyusunan usulan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya untuk sektor industri, dengan tetap memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik di lingkungan eksternal maupun internal.



Gambar 1.1 Bagan alur penyusunan Renstra Provinsi

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, juga berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di sektor perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk kurun waktu 2018 - 2023. Hal ini sesuai dengan amanat INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian komitmen dan konsistensi penyelenggara pemerintahan terhadap Renstra menjadi sangat penting untuk mengukur Tujuan akuntabilitas instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian Provinsi dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan.



gambar 1.2. Keterkaitan RPJMD dan Renstra

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Inpres No. 7 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023 dimaksudkan untuk Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perindustrian untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Maksud lain dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah untuk tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Sulawesi Selatan pada tahun 2019- 2023, khususnya sektor Industri yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai hingga tahun 2023 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2019 – 2023, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Selatan.
2. Rujukan resmi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan.
3. Mempermudah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan
4. Menciptakan tata pemerintahan yang baik.
5. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
6. Acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama tahun 2019 - 2023.

7. Tolok ukur penilaian keberhasilan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program.
8. Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan ke dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka rumusan visi dan misi serta berbagai kebijakan teknis yang ditetapkan, dikaji lebih jauh tingkat relevansinya dengan aspirasi masyarakat serta kondisi daerah saat ini. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Dinas yang disusun keseluruhannya bermuara pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 - 2023. Untuk itu Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan disusun sebagai berikut :

- BAB I.** Pendahuluan yang isinya Mengemukakan Tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- BAB II.** Gambaran Pelayanan SKPD yang isinya Mengemukakan Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Sumber Daya Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.
- BAB III.** Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang isinya Mengemukakan Tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan yang isinya Mengemukakan Tentang Rumusan Perencanaan Komprehensif Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Dalam Renstra 2018 - 2023.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan yang isisnya Mengemukakan Tentang Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang isinya Mengemukakan Tentang Memberikan Gambaran Indikator Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VIII Penutup Kesimpulan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

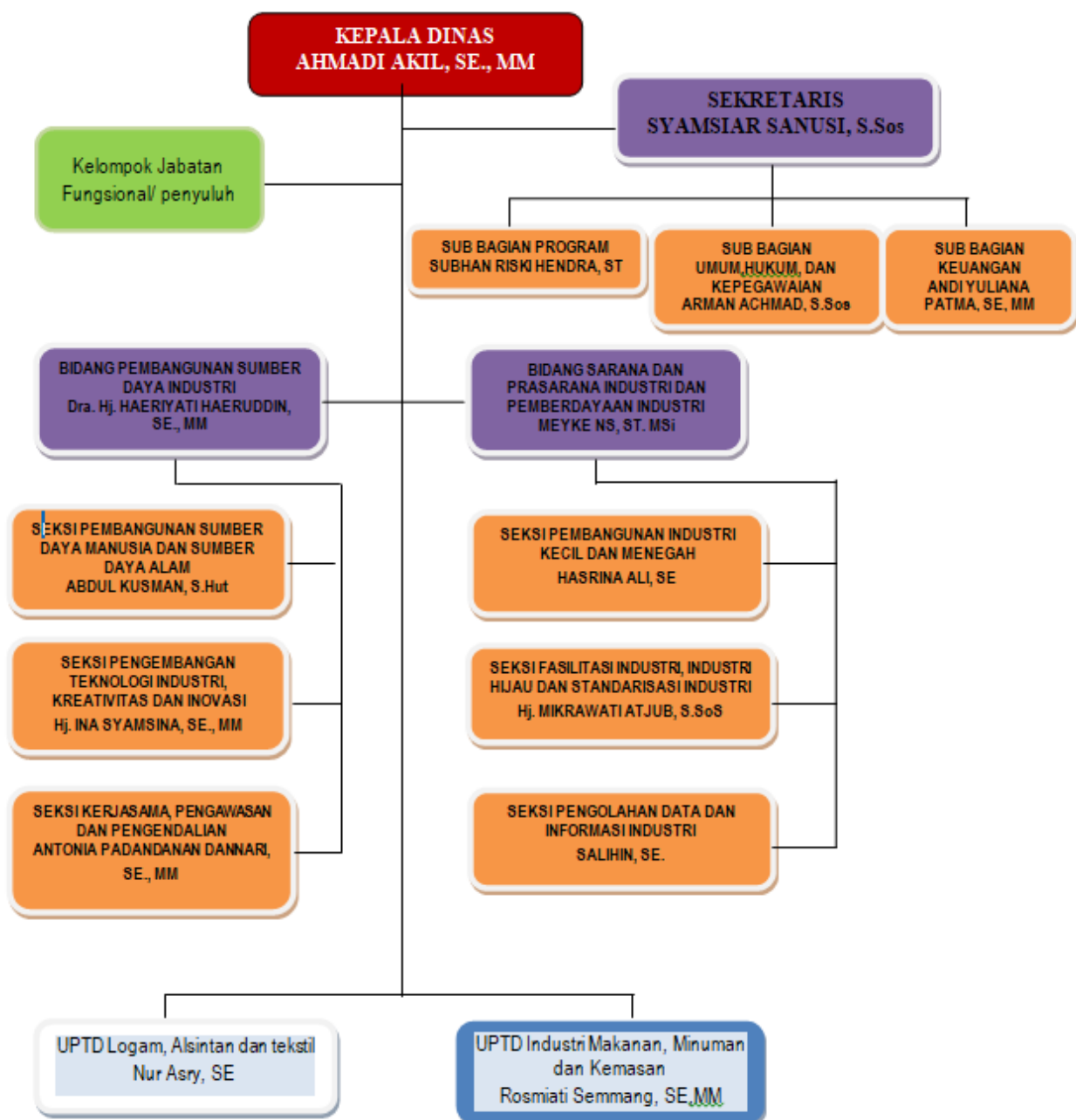
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana di mana di sebutkan dalam pasal 4 adalah sebagai berikut : “Dinas Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, meliputi pembangunan sumber daya industri, dan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.”.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- d. Melaksanakan administrasi Dinas;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas (eselon II A), dengan membawahi 5 (lima) eselon III yakni 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, 2 (dua) orang Kepala Bidang dan 2 (dua) orang Kepala UPTD.

Adapun struktur organisasi sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019 sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat : mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas
2. Bidang Pembangunan Sumberdaya Industri : melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri.
3. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri : melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

- kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.
4. UPTD Logam, Tekstil dan Alat Mesin Pertanian : melaksanakan pelayanan, penyiapan perumusan, peningkatan dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Teknologi Industri
 5. UPTD Makanan, Minuman dan Kemasan : Melaksanakan pelayanan, peningkatan dan pengembangan serta evaluasi dan pelatihan di bidang Industri makanan, minuman dan kemasan bermitra dengan pelaku usaha.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

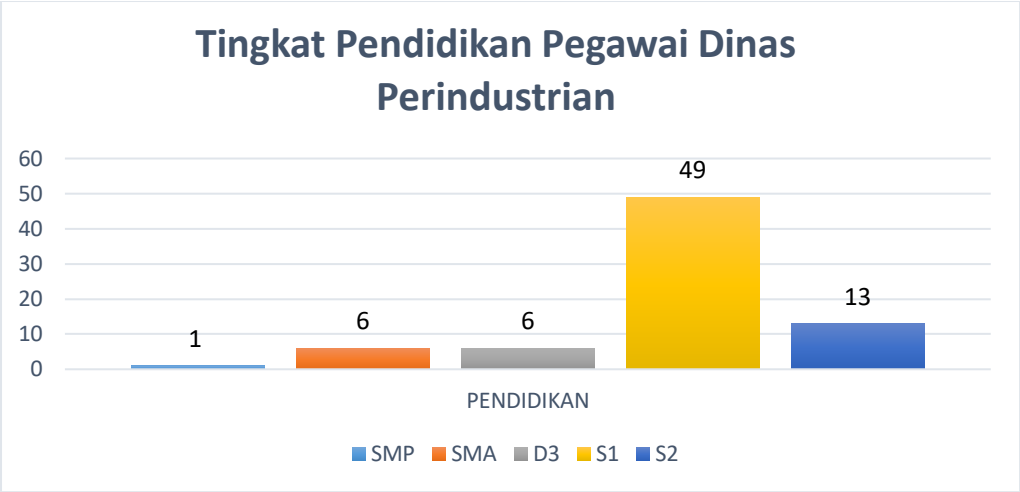
a. Sumber daya Aparatur

Sumber daya Aparatur yang dimiliki Dinas PerindustrianProvinsi Sulawesi Selatan secara kuantitatif sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir Desember 2020sebanyak 75 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- Pegawai negeri sipil fungsional umum sejumlah 63 orang atau (84%) dan fungsional tertentu sejumlah 12orang (16%).
- Bila dilihat dari segi kualitas khususnya tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dirinci sebagai berikut

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN				
		SMP	SMA	D3	S1	S2
1	Laki-laki	1	4	5	27	2
2	Wanita	-	2	1	22	11
Jumlah		1	6	6	49	13
Persentase		1,33 %	8,00 %	8,00 %	65,33 %	17,33 %

Tabel 2.1. Data Pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan menurut tingkat Pendidikan

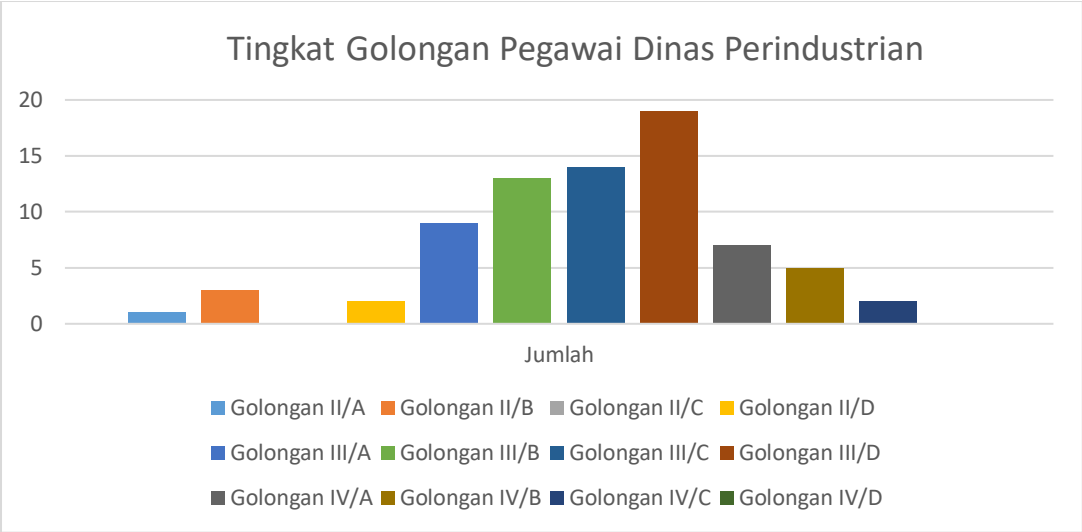


Gambar 2.2. Diagram Tingkat pendidikan pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

Dari sisi pangkat dan golongan keadaan pegawai Dinas Perindustrian dan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan akhir Desember 2020 sebagai berikut :

NO	JENIS KELAMIN	Golongan											
		II.a	II.b	II.C	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	IV.d
1	Laki-laki	1	2	-	2	5	5	10	8	3	1	1	-
2	Wanita		1	-	-	4	8	4	11	4	4	1	-
Jumlah		1	3	-	2	9	12	14	10	7	5	2	-
Persentase		1,33 %	4,00%	-	2,66 %	12,00 %	16,0 %	18,66%	3,33%	9,33 %	6,66 %	2.66 %	-

Tabel 2.2. Data Pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan menurut Golongan



Gambar 2.3. Diagram tingkat golongan pegawai Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

Ditinjau dari jumlah PNS yang ada pada Dinas Perindustrian dan Provinsi Sulawesi Selatan sudah memadai, namun bila dilihat dari tingkat kompetensinya perlu peningkatan SDM yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil di dalam menjabat suatu jabatan struktural maupun jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya serta khususnya dalam menunjang visi dan misi organisasi. Mengenai pegawai negeri sipil yang mengisi jabatan fungsional tertentu sebanyak 12 orang perlu mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan kompetensinya dan perlu dipertegas implementasi penugasannya agar lebih optimal dan tidak tumpang tindih. Selain faktor jumlah dan kualifikasi pendidikan, faktor lain yang sangat perlu mendapat perhatian adalah motivasi dan kedisiplinan.

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan. Demikian juga fasilitas unit pelayanan teknis logam; dan tekstil, serta sarana mobilitas juga masih memerlukan peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sampai akhir Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran, sedangkan aset berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

NO	JENIS/NAMA GEDUNG	LUAS, M2		Lokasi/ Alamat
		Tanah	Bangunan	
1	Bangunan Rumah Dinas	607	270	Jl.Kumala No.166 makassar
2	Bangunan kantor UPT IMMK	725	120	Jl. S. Alauddin No.134 Lr.Salemba Makassar
3	Bangunan Rumah Dinas	900	265	Jl. Adyaksa Makassar
4	Bangunan Kantor UPTD Logam		433	Jl.Ir.Sutami Blok 1-2 Makassar
5	- Pagar Gedung UPTD Logam			
6	- Pemasangan Instalasi			
7	Bangunan Kantor UPT Tekstil	512	453	Kel. Kalosi Enrekang
8	Bangunan Kantor UPT Logam	7.375	10.000	Jl. Industri Kecil Pare-Pare
9	Bangunan Workshop UPT Logam		10.000	Jl. Industri Kecil Pare-Pare
10	Bangunan Kantor UPT Tekstil	4.062	453	Jl. Malingkaan Impalmpa Kab. Wajo
11	Bangunan Kantor	8.935	267	Ds. Solie Kec. Donro Donri Kab. Soppeng
12	Bangunan Kantor UPTD Tekstil		-	Ds. Solie Kec. Donro Donri Kab. Soppeng
13	Bangunan Showroom		10.000	Jl. Industri kecil Pare-pare
14	Pagar Gedung UPTD Logam Pare		800	Jl. Industri kecil Pare-pare
15	Gedung Pengelasan UPTD Logam	11.301	496	Jl. Massepe (Amparita) Kab. Sidrap

16	Bangunan Gedung Pengolahan			Jl.Kima VIII Makassar
17	Bangunan Gedung Workshop	5.050		Ir. Sutami (Tol) Makassar
18	Pagar Rumah Dinas			Jl. Kumala No. 166 Makassar
19	Pengadaan Vertical Blind			Jl. Manunggal 22 Makassar
20	Ruang Sekretaris			Jl. Manunggal 22 Makassar
21	Pagar UPT Soppeng			Ds. Solie Kec. Donri-donri Soppeng
22	Pintu Gerbang Sentra			Jl.Sultan Hasanuddin Cakke, Maroangin Desa Botto Malangga Kec. Maiwa Kab. Enrekang
23	Pergantian Atap Rumah Dinas			Jl. Kumala No. 166 Makassar
24	Bangunan Rumah Dinas (Dekranasda)			Jl. Jenderal Sudirman Makassar
25	Sekat Ruang Kepala Dinas			Jl. Manunggal 22 kec. Maccini Sombala
26	Pagar UPT Logam Sidrap			Jl. Angkasa 45, Massepe Kab. Sidrap
27	Pagar UPT Tekstil Enrekang			Jl. Pasanggrahan Kalosi Enrekang
28	Pintu Gerbang Sentra			Desa Bungaya Kec. Bonto Mate'ne Kab. Kepulauan Selayar
29	Pintu Gerbang Sentra			Jl. Poros Rantepao-Buntao' Lembang La'bo.

				Kec. Sanggalangi' Kab. Toraja utara
--	--	--	--	--

Tabel2.3. Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan

c. Sumberdaya Keuangan

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perangkat otonomi daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (dekonsentrasi).

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2020	Rp. 22,104,308,768,-	Rp.19,168,435,977,-	86.72 %

Tabel 2.4. Jumlah APBD Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (per Desember 2020)

Jumlah dana APBD yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2020APBD Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebesar Rp 22,104,308,768,-Belanja Langsung yang terdiri dari8 (delapan) program dan 49 (Empat PuluhSembilan)kegiatan sebesar Rp. 11,937,575,800,-dengan realisasi Rp. 9,598,786,417,- (80.41%).Sedangkanbelanja tidak langsung Rp. 10.166,732,968,- dengan realisasi Rp. 9,569,469,560,- (94,13%)



**Gambar 2.3. Jumlah APBD Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan
Industri Tahun 2020**

Selain penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD, dalam Tahun Anggaran 2020 Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan tugas dekonsentrasi (APBN) di Sektor Industri, dengan jumlah dana **Rp 2.558.284.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **2.544.463.900,- (99,5%)**.

d. Sumber daya Industri

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait pengembangan industri maka Dinas perindustrian provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi industri yang harus dikembangkan. Mulai dari Industri Besar, menengah sampai yang kecil.

1. Data Industri

- a. Jumlah Perusahaan yang tercatat dalam Kawasan Industri Makassar (KIMA) pada tahun 2019 sebanyak 284 perusahaan baik yang bergerak dalam bidang Industri maupun non Industri.
- b. Jumlah Industri kecil menengah kab/kota se Sulawesi Selatan sebesar 12.581 unit usaha di tahun 2020.
- c. Jumlah Industri Menengah dan Besar sebesar 324 unit usaha.

2. Data penyebaran kawasan industri

Untuk kawasan industri baru ada 2 (dua) yang eksisting di provinsi Sulawesi Selatan baru Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Namun ada beberapa kawasan industri yang sudah dalam tahap pengembangan yakni Kawasan Industri Barru (KIBAR), kawasan industri Maros (KIMAMA) dan kawasan industri Takalar (KITA).

3. Data izin usaha industri

Meningkatnya jumlah produk IKM yang terstandarisasi dan meningkatnya akses IKM terhadap perizinan Industri dengan indikator tingkat kesesuaian prioritas pembangunan. Realisasi indikator dan sasaran strategis yang mendukung sudah terealisasi melebihi dari target RPJMD dimana IKM yang mendapat fasilitasi Sertifikat Haki (merek) target awal adalah 25 IKM dan yang terealisasi sebanyak 56

IKM , dan yang mendapatkan fasilitas sertifikat halal sebanyak 66 IKM jadi total keseluruhan ada 122 IKM yang terstandarisasi ini melebihi target kinerja di tahun 2020.

4. Data sentra industri

Sentra Industri adalah gabungan dari beberapa kelompok industri yang bergerak di bidang yang sama dan dalam satu kawasan atau daerah yang sama. Beberapa Sentra industri yang telah dibentuk dan di bina oleh industri adalah sebagai berikut :

- a. Sentra industri Kerajinan Perak Borong Kota Makassar
- b. Sentra industri Kerajinan Emas Satando Kota Makassar
- c. Sentra industri Kerajinan Tembaga Batua kota Makassar
- d. Sentra industri Kerajinan Emas, Perak dan Tembaga Kariango Kabupaten Pinrang
- e. Sentra industri Kerajinan Anyaman Serat Lontar Kabupaten Takalar
- f. Sentra industri Kerajinan Anyaman Daun Lontar Kabupaten Jeneponto
- g. Sentra industri Kerajinan Lontar kabupaten bine
- h. Sentra industri Kerajinan Anyaman Bambu Kabupaten Enrekang
- i. Sentra industri Tenun Tosara Kabupaten Wajo
- j. Sentra industri Pemintalan Benang Kabupaten Soppeng
- k. Sentra industri Kerajinan Anyaman Rotan Kabupaten Luwu Timur
- l. Sentra industri Kerajinan Aneka Kerang Kota Pare-Pare
- m. Sentra industri Kerajinan Gerabah Kabupaten takalar
- n. Sentra industri Fashion Kabupaten Pangkep
- o. Sentra industri Kerajinan Anyaman Kota Makassar

5. Data Update Industri Kecil dan Menengah yang dibina

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah Pengembangan industri kecil dan menengah. Updating data terkait pengembangan industry kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2016 sebanyak 80 IKM.
- b. Tahun 2017 sebanyak 75 IKM
- c. Tahun 2018 sebanyak 120 IKM
- d. Tahun 2019 sebanyak 50 IKM
- e. Tahun 2020 sebanyak 100 IKM

6. Data inovasi teknologi industri yang dikembangkan

- a. Alat/ Mesin roasting kopi sebanyak 2 unit yakni 1 unit di Kabupaten Tana toraja dan 1 unit di Kabupaten Luwu
- b. Alat/mesin Disk Mill (Penepung kopi) sebanyak 1 unit di kabupaten Luwu
- c. Alat/mesin Penepung Porang sebanyak 1 unit
- d. Alat/mesin Pemipil Jagung sebanyak 1 unit Di kabupaten Bantaeng.
- e. Alat/mesin Power Hammer untuk Sentra Pande Besi sebanyak 2 unit yakni 1 unit untuk sentra Logam Pande Besi Sagana di Kabupaten Enrekang dan 1 unit untuk Sentra Pande besi Tunas Baru Tangti di kabupaten Tana Toraja
- f. Alat/mesin sebanyak 1 unit PowerBelt Grinding di Sentra Pande Besi Kabupaten Tana Toraja.
- g. Alat/mesin Iodisasi garam untuk Sentra Industri Garam sebanyak 1 unit di Kabupaten Jeneponto
- h. Alat/mesin Spinner untuk Sentra Industry Garam sebanyak 1 unut di Kabupaten Jeneponto.
- i. Alat/mesin Pewarnaan kain Sutra sebanyak 1 set untuk 1 sentra Industri Sutra di Wajo
- j. Alat/mesin yakni 1 set alat Pemintalan dan pemasakan kokon untuk sentra Industri Sutra Di Kabupaten Soppeng
- k. Alat/mesin peralatan produksi untuk kerajinan kerang-kerangan sebanyak 1 set di kabupaten Pare-Pare
- l. Alat/mesin produksi dan finishing untuk Industri anyaman rotan sebanyak 1 set di Kabupaten Luwu Timur
- m. Alat/mesin untuk industry kerajinan gerabah sebanyak 1 set di kabupaten Takalar
- n. Alat/mesin jahit sebanyak 2 unit untuk Industri kreatif fashion sebanyak 1 unit di kabupaten Pangkep dan 1 unit untuk sentra kerajinan anyaman di Kota Makassar.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan dana APBN. Dinas Perindustrian memperoleh pendapatan daerah dari retribusi: ekstensifikasi pemakaian kekayaan unit pelayanan teknis logam dan tekstil.

Sedangkan untuk pelaksanaan teknis logam dan tekstil dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi UPT Logam dan Tekstil.

a. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari Restribusi Jasa Umum dan Restribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Adapun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2017 -2020 adalah sebagai berikut :

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2017	255.225.000	131.000.000	51,33% (Dinas Perindustrian)
2018	151.415.000	146.245.500	96,59% (Dinas Perindustrian)
2019	183.120.000	145.826.500	79.63% (Dinas Perindustrian)
2020	147.744.000	105.976.000	71,73% (Dinas Perindustrian)

Tabel 2.5. Target dan Realisasi PAD 2020

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 sebesar Rp. 105.976.000,- atau 71,73 % dari target penerimaan sebesar Rp 147.744.000,-.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2020 terealisasi namun tidak mencapai nilai optimal. **Penurunan PAD** Dinas Perindustrian Tahun 2020 disebabkan karena :

- Wabah Covid 19 memberi dampak negatif terhadap sektor ekonomi yang mengakibatkan menurunnya Pelayanan IKM yang datang untuk mempergunakan peralatan di UPTD.
- Terjadinya bencana pandemic wabah covid 19 yang berpengaruh terhadap produktifitas Industri
- Tidak beroperasinya beberapa UPTD yang berada di daerah Soppeng dan Wajo yang saat ini renovasinya baru selesai di rampungkan namun belum ada kejelasan selanjutnya mengenai MOU dari Dinas

perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah setempat.

- Mesin dan peralatan sudah tua/tidak produktif, ada yang rusak dan tidak presisi lagi sehingga tidak dapat bersaing dengan pesaing lain yang memiliki mesin/ peralatan yang modern dan terbaru. Contohnya UPTD di daerah Sidrap
- Harga bahan baku tinggi dan langkanya bahan baku benang lokal
- Tidak adanya sarana berupa pelayanan angkutan untuk menjangkau pelayanan kepada pelanggan.
- SDM Terbatas.

b. Pengelolaan Belanja Daerah

Pada tahun 2020 Dinas Perindustrian melaksanakan 8 Program dan 49 Kegiatan yang dijabarkan yaitu sebagai berikut :

- 1. Program pelayanan administrasi perkantoran** dengan target kinerja pencapaiannya yaitu persentase pemenuhan administrasi perkantoran sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Terdiri dari kegiatan :

- a. **Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dialokasikan anggaran sebesar Rp.292.964.173,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 273.491.451,- atau sebesar 93,35 %. Target dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan administrasi Perkantoran yakni Ketersediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik selama 12 bulan.
- b. **Kegiatan Penyediaan jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 7.005.415,- atau sebesar 87,57%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan administrasi pajak kendaraan roda 2 sebanyak 16 unit dan roda 4 sebanyak 4 unit dengan realisasi sesuai target yakni roda 2 sebanyak 16 unit dan roda 4 sebanyak 4 unit.
- c. **Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.578.800.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.572.721.828,- atau sebesar 99,62% . Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan administrasi jasa tenaga non pns sebanyak 46 orang dengan realisasinya sesuai dengan target yakni 46 orang.

- d. **Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang cetakan dan Penggandaan** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 110.950.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 110.927.500,- atau sebesar 99,98%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan Alat Tulis Kantor sebanyak 12 jenis dengan realisasi sesuai dengan target yakni 12 jenis Alat Tulis Kantor.
- e. **Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dialokasikan anggaran sebesar 7.556.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 7.556.000,- atau sebesar 100%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia sebanyak 9 unit dengan realisasi sesuai dengan target yakni 9 unit
- f. **Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 180.244.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 179.331.000,- atau sebesar 99,49%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah biaya makan dan minum yang tersedia sebanyak 2 jenis dengan realisasi sesuai dengan target yakni 2 jenis
- g. **Kegiatan Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran** ditiadakan karena dialihkan ke Penanganan Covid 19.
- h. **Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 605.525.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 605.234.400,- atau sebesar 99,95%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah koordinasi /konsultasi kedinasan sebanyak 60

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan targetkinerja pencapaiannya yaitu presentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% terdiri dari :

- a. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 279.500.000,- atau sebesar 99,82%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara sebanyak 1 unit dengan realisasi sesuai dengan target yakni 1 unit rumah dinas/jabatan..
- b. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor/asrama** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.542.000.000,- dan dapat

terrealisasi sebesar Rp. 1.345.072.700,- atau sebesar 52,91%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah unit gedung kantor/asrama yang dipelihara ssebanyak 13 unit dengan realisasi sesuai dengan target yakni 13 unit gedung kantor/asraama..

- c. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala dan penggantian suku cadang kendaraan Jabatan/Dinas** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 386.206.300,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 386.186.751,- atau sebesar 99,99%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah kendaraan jabatan/dinas Kantor yang dipelihara dan dalam kondisi baik sebanyak 10 unit dengan realisasi sesuai dengan target yakni 10 unit kendaraan dinas kantor.
- d. **Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/dinas** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 466.640.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 458.440.000,- atau sebesar 98,24%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia sebanyak 10 unit dengan realisasi sesuai dengan target yakni 10 unit perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan
- e. **Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan dan Peralatan rumah Jabatan/ Dinas** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar 100%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan ketersediaan perlengkapan dan peralatan rumah Jabatan/Dinas sebanyak 10 unit dengan realisasi sesuai dengan target yakni 10 unit .
- f. **Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 840.686.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 446.406.500,- atau sebesar 53,10%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan sarana dan prasaran perkantoran yakni jumlah peralatan kantor yang tersedia sebanyak 3 unit dengan realisasi sesuai dengan target yakni 3 unit peralatan kantor.
- g. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 158.174.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 63.310.000,- atau sebesar 40,03%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan

kantor sebanyak 6 unit dengan realisasi sesuai dengan target yakni 6 unit Alat .

- h. **Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi /Aplikasi/Website** anggaran yang dialokasikan dialihkan ke penanganan Covid 19.

3. Program peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan targetkinerja pencapaiannya yaitu presentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja tepat waktu sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% terdiri dari :

- a. **Kegiatan Forum Perangkat Daerah** anggaran yang dialokasikan dialihkan ke penanganan Covid 19.
- b. **Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen perencanaan dan Penganggaran daerah** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 265.172.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 264.481.600,- atau sebesar 99,74%.Target kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik pokok dan Perubahan yang tersusun sebanyak 4 Dokumen dengan realisasi sebesar 4 dokumen , Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi sebesar 1 dokumen, Jumlah Dokumen Renstra PD yang tersusun dan ditetapkan sebanyak 0 Dokumen dengan realisasi sebesar 0 dokumen dan jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan 4 Dokumen dengan realisasi sesuai dengan target yakni 4 Dokumen
- c. **Penyusunan usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan Informasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** anggaran yang dialokasikan dialihkan ke penanganan Covid 19.
- d. **Kegiatan Pengumpulan dan Publikasi data dan Informas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 390.425.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 361.925.000,-atau sebesar 92,70 % Target kinerja kegiatan ini adalah ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan sebanyak 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan serta ketersediaan data dan informasi yang dipublikasikan sebanyak 3 jenis dengan realisasi sesuai dengan target yakni 3 jenis
- e. **Kegiatan Penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 301.530.015,- dan dapat

terrealisasi sebesar Rp. 301.500.515,- atau sebesar 99,99%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah Laporan Administrasi Keuangan sebanyak 12 Laporan dengan realisasi sesuai dengan target yakni 12 Laporan.

f. **Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 85.970.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 85.959.700,- atau sebesar 99,99%..Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan Jumlah laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun yang disusun sebanyak 2 Laporan dengan realisasi sesuai dengan target yakni 12 Laporan..

g. **Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.500.00,- dan dapat terealisasi sebesar 2.500.000 atau sebesar 100%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun sebanyak 12 Laporan dengan realisasi sesuai dengan target yakni 12 Laporan.

4. **Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan targetkinerja pencapaiannya yaitu presentase Aparatur Sipil Negara berkinerja sangat baik. sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 0 % terdiri dari :**Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan** anggaran yang dialokasikan dialihkan ke penanganan covid 19.

5. **Program pengembangan Sentra-sentra Industri (Prioritas)** dengan targetkinerja pencapaiannya yaitu terbentuknya sentra Industri dengan Infrastruktur dan sesuai peruntukannya dengan pemenuhan sebesar 2 sentra dengan realisasi kinerja sebesar 2 sentra, terbentuknya jumlah kawasan Pergudangan yang tertata dengan pemenuhan sebesar 2 kawasan dengan realisasi kinerja sebesar 2 sentra dan persentase peningkatan produksi Industri Potensial (Prioritas) dengan presentase pemenuhan sebesar 10% dengan realisasi kinerja sebesar 10% terdiri dari :

a. **Kegiatan pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Hasil Hutan** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.900.000,- atau sebesar 100%.Target kinerja kegiatan ini adalah Meningkatnya jumlah dan kualitas Sentra Industri Hasil hutan yang dibentuk dan dibina sebanyak 2 Sentra

dengan realisasi sesuai dengan target yakni 2 Sentra Industri Hasil Hutan.

- b. **Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Tekstil dan Sutra** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 425.060.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.268.513.000,- atau sebesar 63,17%.Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan Jumlah dan meningkatnya Kualitas sentra Industri Tekstil dan sutera sebanyak 2 Setra dengan realisasi sesuai dengan target yakni 2 Sentra Industri tekstil dan Sutra..
- c. **Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Pande Besi** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 101.990.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 101.760.000,- atau sebesar 99,77%..Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan Jumlah dan Peningkatan kualitas Sentra Industri Pande Besi sebanyak 3 Sentra dengan realisasi sesuai dengan target yakni 3 Sentra.
- d. **.Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Kapal Rakyat** anggaran yang dialokasikan dialihkan ke penanganan covid 19
- e. **Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Agro** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 180.383.575,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 179.578.450,- atau sebesar 99,55%.Target kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Sentra Industri Agro yang dibina dan dikembangkan sebanyak 5 Sentra dengan realisasi sesuai dengan target yakni 5 Sentra..
- f. **Kegiatan Penataan dan Pembinaan Sentra Industri Kerajinan dan aneka** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 701.049.425,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 453.716.156,- atau sebesar 64,72 %.Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan peningkatan jumlah dan kualitas sentra industry kerajinan dan aneka yang dibina dan dikembangkan sebanyak 3 Sentra dengan realisasi melebihi target yakni 5 Sentra
- g. **Kegiatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Industri** anggaran yang dialokasikan ditiadakan.

- 6. **Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi** dengan targetkinerja pencapaiannya yaitu pemenuhan Jumlah produk Industri yang memenuhi Standart sebesar4 produk dengan realisasi kinerja sebesar 4 produk terdiri dari :

- a. **Kegiatan Penatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Makanan, minuman dan Kemasan** dialokasikan Anggaran sebesar Rp.52.277.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 51.537.000,- atau sebesar 98,58%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah pelayanan yang dilaksanakan pada UPT Maming dan Kemasan sebanyak 48 pelayanan dengan realisasi sesuai target yakni 48 pelayanan.
- b. **Kegiatan Pengembangan Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Bermitra** dengan Pelaku Usaha Industri dialokasikan anggaran sebesar Rp..213.485.000,- dan terealisasi sebesar Rp.212.557.400,- atau sebesar 99,57%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah Pelaku Usaha Industri yang bermitra dngan UPT Maming dan Kemasan sebanyak 10 Pelaku Usaha Industri dengan realisasi melebihi target yakni 12 Pelaku usaha industry
- c. **Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Teknologi makanan, minuman dan kemasan** alokasi anggaran dialihkan ke penanganan covid 19
- d. **Kegiatan Pengembangan Industri kreatif berbasis Komunitas 19** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 96.902.112,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.714.112,- atau sebesar 99,83%. Target kinerja kegiatan ini adalah Meningkatnya jumlah Industri start up yang dibina dan akses incubator bisnis oleh tenant/masyarakat sebanyak 10 atart up dengan realisasi sesuai dengan target yakni 10 start up
- e. **Kegiatan Pembinaan Standarisasi Produk Industri** dialokasikan anggaran sebesar Rp.445,250,000- dan dapat terealisasi sebesar Rp.442.583.310,- atau sebesar 99,40%.Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan Meningkatnya produk IKM yang terstandarisasi , meningkatnya akses IKM terhadap akses Izin Industri sebanyak 25 IKM dengan realisasi melebihi target yakni sebesar 122 IKM..
- f. **Kegiatan Pengembangan dan pembinaan alat Mesin Pertanian** dialokasikan anggaran sebesar Rp 281.540..000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 280.905.000,- atau sebesar 99,77%. Target kinerja kegiatan ini adalah Meningkatnya teknologi IKM yang menggunakan alat mesin Pertanian sebanyak 3 prototype dengan realisasu 3 prototype dan meningkatkan pengetahuan IKM terhadap teknologi alat pertanian.sebanyak 5 sosialisasi/demontstrasi dengan realisasi sesuai dengan target yakni 5 sosialisasi/demontstrasi..

7. **Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah** dengan targetkinerja pencapaiannya yaitu presentase pemenuhan cakupan kelompok bina kelompok pengrajin sebesar 5 % dengan realisasi kinerja sebesar 5 % dan persentase pemenuhan industry kecil dan menengah yang berkembang sebesar 10% dengan realisasi 10 % terdiri dari :
- a. **Kegiatan IKM Expo** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 69.948.728,- atau sebesar 99,93 %.Target kinerja kegiatan ini adalah Pemenuhan jumlah peserta IKM yang mengikuti kegiatan IKM EXPO dan terlaksananya promosi produk IKM SULSEL melalui IKM EXPO sebanyak 24 IKM dengan realisasi sesuai dengan target yakni 24 IKM .
 - b. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kima Hilir** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 190.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.186.594.800,- atau sebesar 98,21%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah dan peningkatan kualitas IKM Kimia Hilir yang dibina dan dikembangkan sebanyak 10 IKM dengan realisasi melebihi target yakni 25 IKM.
 - c. **Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat Regional, Nasional dan Internasional Industri ITEA** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 150.028.900,- dan dapat terealisasi sebesar .Rp. 112.008.900,- atau sebesar 74,66%.Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah IKM ITEA yang mengikuti gelar aksi produk sebanyak 5 IKM dengan realisasi sesuai dengan target yakni 5 IKM .
 - d. **Kegiatan Pameran Produk IKM pada Event Daerah, Nasional dan Internasional** dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.731.400,- dan dapat terealisasi sebesar .Rp.12.731.400,- atau sebesar 100%.Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah IKM yang produknya terpromosikan sebanyak 5 IKM dengan realisasi sesuai dengan target yakni 5 IKM.
 - e. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah** alokasikan anggaran dialihkan ke penanganan covid 19
 - f. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengrajin Industri** alokasi anggaran dialihkan ke penanganan covid 19.

- g. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Hilirisasi Hasil Pertambangan dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.965.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 21.965.000,- atau sebesar 100 %.Target kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas produk IKM Hilirisasi hasil pertambangan yang dibina dan di kembangkan sebanyak 3 IKM dengan realisasi sesuai dengan target yakni 3 IKM.
 - h. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri hasil Agro (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan)** dialokasikan anggaran sebesar Rp.163.600.300,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.161.296.200,- atau sebesar 98,59%%.Target kinerja kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas Produk Industri Hilirisasi Hasil Agro (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan) sebanyak 3 IKM dengan realisasi sesuai dengan target yakni 3 IKM.
 - i. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Hilirisasi Hasil Hutan** dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.898.100,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.7.898.100,- atau sebesar 100%. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah IKM Hilirisasi hasil Kehutanan yang dibina sebanyak 3 IKM dengan realisasi sesuai dengan target yakni 3 IKM.
8. **Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri** dengan targetkinerja pencapaiannya yaitu pemenuhan jumlah industry yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan sebesar 1 Industri dengan realisasi kinerja sebesar 1 Industri dan pemenuhan jumlah peralatan pengujin produk Industri yang memenuhi standar sebesar 1 unit dengan realisasi sebesar 1 unit terdiri dari :
- a.**Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Alat Angkut** alokasi anggaran Dialihkan ke penanganan covid 19.
 - b.**Kegiatan Klinik Teknologi** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36.350.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 36.200.000,- atau sebesar 99,59%. Target kinerja kegiatan ini adalah Meningkatnya jumlah Industri berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan serta Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri IKM setelah Berkonsultasi di Klinik Teknologi sebanyak 25 IKM dengan realisasi sesuai dengan target yakni 25 IKM.
 - c.**Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Logam, Alsintan dan Tekstil** dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 118.522.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 70.411.501,- atau sebesar 59,41%. Target kinerja kegiatan ini adalah Pemenuhan pelayanan Administrasi UPTD Logam, Tekstil dan Alsinta sebanyak 3 UPTD dengan realisasi sesuai dengan target yakni 3 UPTD.

d. Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Logam dan Alsintan dialokasikan anggaran sebesar Rp.143.300.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.59.115000,- atau sebesar 41,25%. Target kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya Pelayanan UPTD Logam dan Alsinta sebanyak 20 IKM dengan realisasi sesuai dengan target yakni 20 IKM

e. .Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tekstil dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.14.725.000,- atau sebesar 95,17%. Target kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah dan akses pelayanan UPTD tekstil ke IKM yang dibina sebanyak 25 IKM dengan realisasi sesuai dengan target yakni 25 IKM.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke		Realisasi Capaian Tahun ke		Rasio Capaian Pada Tahun Ke	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	69,25%	69,60%	69,25%	69,60%
2	% ASN Nilai SKP kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah pertumbuhan industri kecil dan	1.000 IKM	1.000 IKM	1.000 IKM	1.000 IKM	1.000 IKM	461 IKM	- 1.127 IKM	46%	- 112,7%

	menengah									
5	jumlah sentra industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan	3 sentra	3 sentra	3 sentra	3 sentra	3 sentra	6 sentra	8 sentra	200%	266%
6	Jumlah Kawasan industri yang dibentuk, dibina dan dikembangkan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	100%	200%
7	jumlah SDM industri yang dibina	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	645 orang	480 orang	645%	480%
8	Jumlah inovasi industri yang dikembangkan untuk hilirisasi industri	6 inovasi	6 inovasi	6 inovasi	6 inovasi	6 inovasi	3 inovasi	5 inovasi	50%	83%

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada tahun ke		Realisasi anggaran pada tahun		Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI	1,033,133,500	1,414,383,000	971,165,085	1,009,467,606	94	71,37	36,9%	3,9%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	1,518,195,000	1,089,454,112	1,455,797,443	1,084,323,822	95,89	99,53	-25%	-25%
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	2,176,930,950	616,223,700	2,136,120,843	572,443,128	98,13	92,90	-71%	-73%
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	1,174,684,500	313,172,500	1,133,958,401	180,001,501	96,53	57,48	-73%	-84%

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3,636,791,360	2,784,039,173	3,598,619,367	2,756,267,594	98,85	99	-23%	-23%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	775,315,000	4,674,706,300	765,972,369	2,979,915,951	98,79	63,75	502%	289%
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	321,978,040	1,045,597,015	320,889,139	1,016,366,815	99,66	97,20	224%	216%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari hasil analisis Renstra Kementerian Perindustrian, RPJMD, RTRW dan KLHS, yang berimplikasi bagi pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, maka diidentifikasi beberapa tantangan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan produktivitas sumber daya manusia industri;
2. Kurangnya daya saing dan diversifikasi produk industri olahan untuk tingkat nasional dan internasional;
3. Kurangnya promosi produk industri;
4. Adanya pasar global dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat persaingan semakin tajam;
5. Kontinuitas bahan baku bagi pengembangan industri pengolahan.

Sementara itu, selain tantangan terdapat juga peluang yang dapat diambil manfaatnya secara maksimal, Berikut identifikasi beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan :

1. Adanya dukungan peraturan daerah yang lebih fokus dalam pengembangan industri dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan dan peraturan/perundangan lainnya;
2. Potensi jumlah komoditi unggulan di Sulawesi Selatan;
3. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan yang cukup banyak;
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah meningkatkan produksi dan pemasaran produk industri.

Dari tantangan dan peluang tersebut diatas, dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, berikut peningkatan pelayanan yang diperlukan :

1. Untuk meningkatkan sumber daya manusia industri dilakukan beberapa hal, antara lain :
 - a. Ikut serta berperan dalam program vokasi industri yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian dengan *Link and Match* antara SMK dan industri;
 - b. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pelaku usaha dan wirausaha baru di kabupaten/kota;
 - c. Memfasilitasi magang industri bagi ikm potensial;
 - d. Sosialisasi/demonstrasi mesin/peralatan bagi ikm di kabupaten/kota.
2. Dalam daya saing dan diversifikasi produk maka hal-hal yang dilakukan adalah :
 - a. Pengusaan teknologi merupakan salah satu peningkatan daya saing, oleh karena itu perlu dibuat klinik teknologi di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang mudah diakses oleh IKM untuk meningkatkan

- kemampuan keterampilan penggunaan teknologi dan mendapatkan informasi teknologi pengolahan yang efektif dan efisien.
- b. Kemasan merupakan daya tarik pertama bagi konsumen, perlu ditingkatkan kualitas kemasan produk lokal agar memiliki daya saing. Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kemasan adalah membentuk klinik kemasan di Makassar yang akan memberikan pelayanan kepada IKM terkait kemasan baik label kemasan, desain kemasan, bahan kemasan, teknologi pengemasan, informasi legalitas produk dll, selain klinik perlu juga melakukan pelatihan dan pendampingan langsung ke IKM tentang pentingnya kemasan.
 - c. Legalitas dalam bentuk TDI/UII, P-Irt, SNI, Halal, HACCP, MD dll dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat baik nasional ataupun internasional. Legalitas merupakan daya saing, hal-hal yang perlu dilakukan adalah pendampingan IKM dalam pengurusan legalitas, sosialisasi tentang P-irt, Halal, SNI dan TDI/UII;
 - d. Diversifikasi produk dalam rangka meningkatkan variasi produk olahan agar tidak terpaku pada satu jenis produk, dengan melihat peluang pasar/minat masyarakat terhadap suatu produk sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing. Untuk menambah keterampilan IKM dalam diversifikasi produk maka perlu dilakukan pelatihan pengolahan.
 - e. Salah satu hal terpenting dalam pengembangan industri adalah mencari pasar, oleh karena itu untuk meningkatkan promosi dan menarik buyer akan diselenggarakan IKM Expo produk lokal Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, selain itu akan memfasilitasi atau mengikutsertakan produk IKM ke pameran tingkat lokal, nasional dan internasional.
3. Untuk menumbuhkan industri olahan komoditi unggulan perlu penguatan kelembagaan dalam bentuk kelompok/sentra. Sentra merupakan pengelompokan industri sejenis dalam suatu kawasan. Jika dalam kab/kota terdapat sentra industri maka hilirisasi komoditi unggulan daerah tersebut akan terwujud dan pengelolaan industri secara kelompok akan lebih mudah untuk dibina dan diarahkan sehingga kesejahteraan akan lebih merata. Salah satu focus program kegiatan Dinas Perindustrian adalah Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial dengan membentuk sentra industri baru dan pembinaan/pengembangan sentra yang sudah ada.
 4. Untuk meningkatkan investasi/penanaman modal memang perlu dibangun pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah sesuai RTRW, seperti pembangunan Kawasan Industri Skala Besar dan Kawasan Industri Skala Kecil dan Menengah serta infrastruktur pendukungnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu peran serta dari berbagai stakeholder.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023 meskipun telah menunjukkan pencapaian sasaran yang memadai namun masih ditemukan berbagai hambatan dan permasalahan dalam rangka optimalisasi sumber daya untuk mendukung pengembangan Sektor Perindustrian di Provinsi Sulawesi Selatan. Hambatan dan permasalahan yang dimaksud antara lain adalah :

A. Faktor Internal

1. Belum berfungsinya secara optimal sistem informasi yang ada sehingga tingkat layanan pada dunia usaha dalam aspek informasi teknologi industri, peluang dan tantangan pasar masih relatif rendah.
2. Keserasian dan sinergitas program antar perangkat daerah pelaksana masih perlu ditingkatkan dan terfokus pada komoditas unggulan yang disepakati untuk dibina.

B. Faktor Eksternal

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi yang dipandang dapat mempengaruhi. **Perubahan Iklim, Bencana Alam dan Pandemi COVID 19** paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan.

Sebagai gambaran bahwa penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu

lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar di mana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

Penyebab Pemanasan Global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO₂ dan Metana yang berasal dari Industri, Kendaraan bermotor dan makhluk hidup penghasil metana alamiah seperti bakteri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, Pertanian dan fungsi lainnya. Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang. Ditambah dengan pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia yang mengakibatkan banyaknya perubahan yang terjadi pada masyarakat kita yakni kontraksi pertumbuhan ekonomi di sulawesi selatan yang menurun drastis dari tahun 2019. apalagi dengan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan oleh pemerintah yakni wajib menggunakan masker, jaga jarak, social distancing (pembatasan sosial secara besar-besaran), hal ini berdampak sekali terhadap perkembangan industri utamanya pada industri kecil menengah. Permasalahan utama yakni terbatasnya ruang gerak dari para pelaku industri, pemasaran produk tidak berjalan lancar, pengurangan pemasukan berakibat juga dengan pengurangan jumlah pekerja. Bisa dikatakan di tahun 2020 jumlah industri kecil dan menengah mengalami penurunan yang signifikan diakibatkan pandemi covid 19.

Dari kondisi tersebut maka hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya daya saing dan kualitas industri lokal
- b. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri
- c. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia industri
- d. Terbatasnya kemampuan pelaku IKM terkait Inovasi dan update teknologi industri
- e. Belum adanya ikon produk industri yang identik di masing-masing kabupaten kota
- f. Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan industri tidak sesuai dengan kebutuhan
- g. Meningkatnya produk impor yang murah yang kurang bersaing dengan produk lokal.
- h. Terbatasnya akses permodalan bagi IKM.
- i. Belum maksimalnya penataan kawasan sentra industri.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka strategi pemecahan masalah yang dapat ditempuh, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, stakeholder terkait, serta meningkatkan sinergitas pembinaan antara perangkat pelaksana dalam lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan daya saing wilayah untuk menarik minat investor pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada komoditi primer.
3. Meningkatkan kemampuan SDM para pelaku usaha, khususnya IKM.
4. Meningkatkan kemampuan inovasi teknologi, khususnya IKM melalui kemitraan dengan perusahaan menengah dan besar
5. Meningkatkan kapasitas sarana distribusi dan kemampuan logistik.
6. Penataan dan pengembangan sistem informasi industri yang dapat melahirkan data dan informasi yang akurat untuk penyusunan program dan rencana pembinaan serta berfungsi sebagai sumber informasi yang efisien dan efektif bagi dunia usaha.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi, baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran organisasi (*learning organization*).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan

A. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. **INOVATIF** adalah kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang bersih dan melayani
2. **KOMPETITIF** adalah kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang sehat dan cerdas.\
3. **PRODUKTIF** adalah Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera.
4. **INKLUSIF** adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi.
5. **BERKARAKTER** adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang berkarakter.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. **Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif**, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi.
2. **Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel**, membangun infrastruktur dalam menguatkan interkoneksi antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir.
3. **Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif**, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah.
4. **Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**, memenuhi akses pendidikan yang berkualitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa hambatan bagi seluruh warga serta mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah.
5. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan**, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

3.2.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2018-2023

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih ada beberapa factor pendukung dan penghambat pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yakni sebagai berikut :

- Faktor Penghambat : sebagian besar kegiatan nantinya akan focus pada pengembangan infrastruktur, sehingga untuk pengembangan industry tidak lagi menjadi prioritas utama pengembangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Faktor Pendukung : dengan adanya pengembangan wilayah pengembangan ekonomi baru maka beberapa pemerataan pembangunan ekonomi di masyarakat bisa lebih merata.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

3.3.1 Kementerian Perindustrian

Pembangunan nasional secara terencana harus terus terjaga dengan seksama agar pemerintah mampu mewujudkan Visi Indonesia **menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025** sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan industri. Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini. Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008) disusun dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti industri daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Visi pembangunan industri nasional jangka panjang tahun 2025 adalah membawa Indonesia pada tahun 2025 menjadi negara industri tangguh yang bercirikan:

1. Industri Kelas Dunia;
2. PDB Sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan di Luar Jawa;
3. Teknologi telah menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar;

Visi Pembangunan Industri Indonesia pada tahun 2025 adalah menjadi Negara Industri tangguh dengan ciri-ciri seperti yang telah disampaikan di atas. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan visi antara untuk tahun 2020 yaitu Indonesia menjadi negara industri maju baru, dan visi yaitu Memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan (*sustainable*) serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi.
2. terselesaikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai tambah.
3. Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.
4. Tercapai peningkatan industri penunjang komponen
5. Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi)

Sesuai dengan Visi di atas, maka misi lima tahun sampai dengan 2018 dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri
2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDRB.

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;
2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.

Sasaran Strategis II: Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional;
2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.

Sasaran Strategis III: Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;
2. Indeks iklim industri Nasional.

Sasaran Strategis IV: Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif;
2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri.

Sasaran Strategis V: Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan indikator Kinerja Utama:

1. Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia);
2. Tumbuhnya Industri Komponen *Automotive*, Elektronika dan Permesinan;

3. Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.

Sasaran Strategis VI: Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;
2. Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sasaran Strategis VII: Meningkatnya peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama :

1. Tumbuhnya Industri Kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Tumbuhnya Industri Menengah dua kali diatas Industri Kecil;
3. Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “*Out-Source*” Industri Besar.

3.3.2. Keterkaitan Renstra Kementerian dan Lembaga terhadap Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan tujuan dan Rentsra Kementerian dan Lembaga Perindustrian ada beberapa keterkaitan Renstra Kementerian dan Lembaga di Bidang Industri dengan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebagai berikut :

- Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah.
- Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industry.
- Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri, dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif dan Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri.

3.3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang mempengaruhi pencapaian Renstra Kementerian dan Lembaga

Berdasarkan tujuan dan Rentsra Kementerian dan Lembaga ada beberapa factor pendukung dan penghambat dalam pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yakni sebagai berikut :

- Faktor Penghambat : Adanya pasar global dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat persaingan semakin tajam
- Faktor Pendukung : dengan adanya kebijakan pemerataan pertumbuhan ekonomi di bidang industry di luar jawa, hal ini akan lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sector industry untuk wilayah di luar pulau jawa utamanya di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan.

Rencana struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.

1. Kepulauan Selayar Kawasan Benteng dan Kawasan Pamatata
2. Bulukumba (Agroindustri, Pertanian, Pariwisata, Perikanan)
3. Bantaeng Kawasan Perkotaan
4. Jeneponto (Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata)
5. Takalar Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan jasa)
6. Gowa Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)
7. Sinjai kawasan pusat kegiatan local
8. Maros Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)
9. Pangkep (Agroindustri, Perikanan, Pariwisata)
10. Barru (Agroindustri, perikanan, pertanian, perkebunan) dan Kawasan EMAS
11. Watampone (Agroindustri, Perikanan, Pertanian)
12. Soppeng kawasan pusat kegiatan lokal
13. Wajo kawasan pusat kegiatan local

14. Sidrap kawasan pusat kegiatan lokal
15. Pinrang kawasan pusat kegiatan lokal
16. Enrekang kawasan pusat kegiatan lokal
17. Luwu kawasan pusat kegiatan lokal
18. Tana Toraja kawasan pusat kegiatan lokal
19. Luwu Utara kawasan pusat kegiatan lokal
20. Luwu Timur KTM Mahalona Kawasanpusat kegiatan lokal
21. Toraja Utara kawasan pusat kegiatan local
22. Makassar Kawasan perkotaan mamminasata (perdagangan dan jasa)
23. Parepare (Agroindustri, Perikanan)
24. Palopo (Agroindustri, Perkebunan, Pertanian)

Sistem perkotaan nasional di Sulawesi Selatan meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi.

Sedangkan sistem perkotaan provinsi sebagaimana arahan RTRWP selain mengalokasikan sistem perkotaan nasional sebagaimana arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di Bantaeng, Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang, kawasan perkotaan KTM Mahalona di kabupaten Luwu Timur, kawasan perkotaan EMAS di kabupaten Barru sebagai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan perkotaan Pamatata di kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kawasan pusat distribusi bahan kebutuhan pokok kawasan timur Indonesia.

Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah pusat, kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan

pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman. Tentang RTRW Prov. Sulsel Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan Metropolitan Mamminasata yang terdiri dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, Sungguminasa, dan Kabupaten Takalar. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata diarahkan sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama Kawasan Timur Indonesia, serta sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi di Sulawesi Selatan. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan di Kota Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene, Jeneponto, dan Bulukumba. PKW merupakan kawasan perkotaan berfungsi sebagai simpul kegiatan perdagangan.

Selain Pusat Kegiatan Lokal, RTRWP Sulawesi Selatan juga menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Sulawesi Selatan terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah:

a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:

1. Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar;
2. Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kepulauan Selayar;
3. Kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di masing-masing Kabupaten: Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu utara, dan Luwu Timur;
4. Kawasan pengembangan budidaya udang meliputi tambak di Kabupaten: Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, dan Wajo; Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Mamminasata;
6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru;
7. Kawasan Industri (KI) skala besar meliputi: kawasan-kawasan industri di wilayah Metropolitan Mamminasata yang terdiri atas KI Makassar (Kota Makassar), KI Maros(Kabupaten Maros), KI Gowa (Kabupaten Gowa), KI Takalar (Kabupaten Takalar), selain dari pada itu diarahkan pengembangan KI

Parepare (Kota Parepare), pabrik pengolahan nikel Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), pabrik semen Tonasa (Kabupaten Pangkep), pabrik semen Bosowa (Kabupaten Maros).

- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Sosial dan Budaya yaitu: kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba.
- c. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi, yaitu:
 1. Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara (Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok Kambuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar;
 2. Pusat-pusat pembangkit listrik terdiri atas PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto), PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang) d. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu:
 - Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pangkep); Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar);
 - Kawasan Konservasi kawasan Danau Tempe (Kabupaten Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap);
 - Kawasan bendungan yang terdiri atas Bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone).

Pengembangan kawasan di Sulawesi Selatan, selain didasarkan pada RTRWP juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan keberadaan Kawasan Andalan Laut dan Kawasan Andalan Darat di Sulawesi Selatan. Kawasan Andalan merupakan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah disekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah. Adapun kawasan andalan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

- a. Kawasan Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, dan agroindustri;
- b. Kawasan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

- c. Kawasan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan.
- d. Kawasan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, perikanan, agroindustri dan pertanian.
- e. Kawasan Andalan laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- f. Kawasan Andalan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan pertambangan.
- g. Kawasan Andalan laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- h. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Tipe iklim D dengan curah hujan rata-rata 2000-2500 MM/tahun. Tipe iklim ini terbagi 3 yaitu wilayah yang masuk ke dalam iklim D1 meliputi kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja dan Enrekang. Wilayah yang termasuk ke dalam iklim D2 terdiri dari kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Sinjai, Luwu, Enrekang dan Maros. Wilayah yang termasuk iklim D3 meliputi Kabupaten Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan kota Makassar. Tipe iklim E dengan curah hujan rata-rata antara 1500-2000 mm/tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Tipe iklim E1 terdapat di Kabupaten Maros, Bone dan Enrekang, Bantaeng dan Selayar.

Pengelolaan kawasan peruntukan industri di Sulawesi Selatan dikategorikan dalam kawasan industri skala besar dan kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah. Pengelolaan kawasan peruntukan industri di Sulawesi Selatan ditetapkan di:

- a. Kawasan industri skala besar diarahkan pada Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa;
- b. Kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah diarahkan pada: Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto.

3.4.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang mempengaruhi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- Faktor Penghambat : Masih rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan produktivitas sumber daya manusia industri

- Faktor Pendukung : dengan telah ditentukannya zona dan kawasan pengembangan perekonomian di Sulawesi Selatan maka akan lebih efektif dan efisien pengembangan industry.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan analisis terhadap (1) permasalahan atau kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (2) peranannya dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023, (3) Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, (4) potensi dan kondisi serta rencana pembangunan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dan (5) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta memperhatikan lingkungan strategis yang berpengaruh, maka ditetapkan isu-isu strategis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut :

1. Pengembangan industri di 24 Kabupaten/ Kota yang berbasis sumberdaya local
2. Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, inovasi produk lokal dan sistem produksi industri untuk meningkatkan daya saing produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)
3. Peningkatkan kelembagaan dan tata laksana pelayanan melalui peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan dalam Renstra Perubahan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	% Nilai SAKIP organisasi perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
			% ASN nilai SKP kategori baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
			Rata- rata capaian kinerja perangkat daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
			% temuan material	0.1 persen	0.1 persen	0.07 persen	0.05 persen	0.03 persen
2	Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalm mendorong perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap nilai PDRB	% kontribusi sektor industri terhadap PDRB	12 Persen	11 Persen	12.5 Persen	13 Persen	13 Persen
3	Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri baru	Meningkatnya penerapan standarisasi industri	% Industri yang telah terstandarisasi	24 Persen	20 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen
4	Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri baru	Meningkatnya pengelolaan, penyediaan dan penyebaran informasi industri	% Akses dan pemanfaatan informasi industri oleh masyarakat	1 Persen	1 Persen	2 Persen	2.5 Persen	3 Persen

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Umum Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

Strategi dankebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra dengan efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra)bagi Dinas Perindustrian.

Strategi dan Kebijakan UmumRenstra Perubahan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2018 - 2023 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Pemerintahan yang Berorientasi, Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	(1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	(1) Peningkatan akuntabilitas perangkat daerah	(4) peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah
MISI : (5) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(2) Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalm mendorong perekonomian daearh	(2) Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap nilai PDRB	(2) Peningkatan nilai PDRB sektor industri	(3) peningkatan kontribusi sektor industri terhadap nilai PDRB
(3) Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri baru	(3) Meningkatnya penerapan standarisasi industri (4) Meningkatnya pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi industri	(3) Peningkatan standarisasi industri (4) Peningkatan informasi industri	(1) Peningkatan daya saing industri melalui penerapan standarisasi industri (2) peningkatan publikasi informasi industri dan akses informasi industri ke masyarakat

**Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan**

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 serta Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 - 2023 adalah serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel TC.27 (Draft Rancangan Awal)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab		
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah	% ASN nilai SKP kategori baik Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (Evaluasi dokumen perencanaan) % temuan material	0	00	X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP Persentase ASNP perangkat daerah berkinerja kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	0,1% 90% 90%	0.1% 100% 100%	0,00 100% 100%	0.1% 100% 100%	0,00 100% 100%	0.07% 100% 100%	25.747.767.879,00 	0.05% 100% 100%	23.857.061.829,00 	0.03% 100% 100%	25483299254.56 	0.03% 100% 100%	75088128962.56 	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.01	X.XX.01.1.01XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	0persen	0,00	0persen	0,00	100persen	827.111.000,00	100persen	919.000.000,00	100persen	965.050.000,00	100persen	2.711.161.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.01	X.XX.01.1.01.01XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen) jumlah peserta yang mengikuti forum OPD (orang)	7dokumen 100orang	0dokumen 0orang	0,00 0orang	0dokumen 0orang	0,00 100orang	7dokumen 100orang	386.932.000,00 	7dokumen 100orang	425.000.000,00 	7dokumen 100orang	446.250.000,00 	7dokumen 100orang	1.258.182.000,00 	Dinas Perindustrian

			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.01	X.XX.01.1.01.02	XXX KoordinasidanPeny usunanDokumen RKASKPD	persentasepenyu sunandokumen rkaskpdtcepatwakt u (persen)	100persen	0persen	0,00	0persen	0,00	100persen	386.932.000,00	100persen	425.000.000,00	100persen	446.250.000,00	100persen	1.258.182.000,00	Dinas Perindustrian
--	--	--	---	----	---------	--------------	-----------------	--	---	-----------	---------	------	---------	------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	------------------	------------------------

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran			Kode	Program/ Kegiatan/S ubkegiatan	IndikatorKinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Out put)/Subkegiata n(Suboutput)	DataCapaian padaTahunA walPerencana an	TargetKinerjaProgram/KegiatandanSubkegiatan danKerangkaPendanaan												OPD Penanggung Jawab		
									Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		KondisiKinerjapadaAkhirPeriodeRen straPD				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.01	X.XX.01.1.01.03	XXX KoordinasidanPeny usunanDokumenPe rubahanRKASKPD	persentasepenyus unandokumenrka perubahanskpdte patwaktu(persen)	100%	0persen	0,00	0persen	0,00	100persen	8.709.000,00	100persen	12.000.000,00	100persen	12.600.000,00	100persen	33.309.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.01	X.XX.01.1.01.04	XXX KoordinasidanPeny usunanDPASKPD	persentasepenyu sundokumend paskpdtepatwakt u (persen)	100%	0persen	0,00	0persen	0,00	100persen	9.484.000,00	100persen	10.000.000,00	100persen	10.500.000,00	100persen	29.984.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.01	X.XX.01.1.01.05	XXX KoordinasidanPeny usunanPerubahanD PASKPD	persentasepenyus unandokumendpa perubahanskpdte patwaktu(persen)	100%	0persen	0,00	0persen	0,00	100persen	9.554.000,00	100persen	12.000.000,00	100persen	12.600.000,00	100persen	34.154.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.01	X.XX.01.1.01.06	XXX KoordinasidanPeny usunanLaporanCap aianKinerjadan IkhtisarRealisasiKin erja SKPD	jumlahlaporanc apaiankinerjad anikhtisarrealis asiskpd(lapora n)	12laporan	0laporan	0,00	0laporan	0,00	12laporan	7.500.000,00	12laporan	10.000.000,00	12laporan	10.600.000,00	12laporan	28.100.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.01	X.XX.01.1.01.07	XXXEvaluasiKinerj aPerangkatDaera h	jumlahdokumen evaluasiKinerjap erangkatdaerah(dokumen)	4dokumen	0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	4dokumen	18.000.000,00	4dokumen	25.000.000,00	4dokumen	26.250.000,00	4dokumen	69.250.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.02		X.XX.01.1.02XXX AdministrasiKeuan ganPerangkatDaer ah	%Penyusunando kumenLaporanK euanganTepat Waktu	100%	0persen	0,00	0persen	0,00	100persen	12.402.813.853,00	100persen	13.660.000.000,00	100persen	14.343.000.000,00	100persen	40.405.813.853,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.02	X.XX.01.1.02.01	XXXPenyediaanGaji danTunjanganASN	JumlahPegawaiy angdibayarkang ajidantunjangan nya(orang)	77orang	0orang	0,00	0orang	0,00	77orang	11.819.243.553,00	77orang	13.000.000.000,00	77orang	13.650.000.000,00	77orang	38.469.243.553,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.02	X.XX.01.1.02.03	XXXPelaksanaanPe natausahaandanPe ngujianVerifikasiKe uanganSKPD	jumlahsubkegi atanpelaksanaa npenatusahaan danpengujian/ verifikasikeuan ganskpd (subkegiatan)	49subke giatan	0subkegiatan	0,00	0 subkegia tan	0,00	31 subkegia tan	262.067.300,00	31 subkegia tan	300.000.000,00	31 subkegia tan	315.000.000,00	31 subkegia tan	877.067.300,00	Dinas Perindustrian

			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.02	X.XX.01.1.02.04	XXX KoordinasidanPelak sanaanAkuntansiSK PD	jumlah laporankeuang an skpd(laporan)	100%	0laporan	0,00	0laporan	0,00	19laporan	316.081.000,00	19laporan	350.000.000,00	19laporan	367.500.000,00	19laporan	1.033.581.000,00	Dinas Perindustrian
--	--	--	---	----	---------	--------------	-----------------	--	--	------	----------	------	----------	------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	------------------	------------------------

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator/ Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/ Kinerja Program/ Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab			
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi/ Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.02	X.XX.01.1.02.06	XXX Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan hasil pemeriksaan (laporan)	2laporan	0laporan	0,00	0laporan	0,00	2laporan	5.422.000,00	2laporan	10.000.000,00	2laporan	10.500.000,00	2laporan	25.922.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.04		X.XX.01.1.04XXX Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rp.147.744.000	0Rupiah	0,00	0Rupiah	0,00	2000000000 Rupiah	0,00	2100000000 Rupiah	200.000.000,00	2205000000 Rupiah	210.000.000,00	2205000000 Rupiah	410.000.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.04	X.XX.01.1.04.01	XXX Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah (dokumen)	1dokumen	0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	1dokumen	100.000.000,00	1dokumen	105.000.000,00	1dokumen	205.000.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.04	X.XX.01.1.04.02	XXX Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	jumlah dokumen analisis pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi (dokumen)	2dokumen	0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	2dokumen	100.000.000,00	2dokumen	105.000.000,00	2dokumen	205.000.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.05		X.XX.01.1.05XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaian kepegawaian perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100%	0persen	0,00	0persen	0,00	100persen	93.135.000,00	100persen	100.000.000,00	100persen	105.000.000,00	100persen	298.135.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.05	X.XX.01.1.05.11	XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undanganyang dilaksanakan (laporan)	1laporan	0laporan	0,00	0laporan	0,00	1laporan	93.135.000,00	1laporan	100.000.000,00	1laporan	105.000.000,00	1laporan	298.135.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.06		X.XX.01.1.06XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	75%	100persen	0,00	100persen	0,00	100persen	749.100.900,00	100persen	823.061.829,00	100persen	867499254.56	100persen	2439661983.56	Dinas Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran			Kode	Program/ Kegiatan/S ubkegiatan	IndikatorKinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Out put)/Subkegiata n(Suboutput)	DataCapaian padaTahunA walPerencan aan	TargetKinerjaProgram/KegiatandanSubkegiatan danKerangkaPendanaan												OPD Penanggung Jawab		
									Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		KondisiKinerja padaAkhirPeriodeRen straPD				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.06	X.XX.01.1.06.01	XXXPenyediaanKo mponenInstalasiLi strikPeneranganB angunanKantor	jumlahkomponen instalasilistrik/pe neranganbangun ankantoryangdis ediak(unit)	100unit	0unit	0,00	0unit	0,00	520unit	7.770.000,00	520unit	23.061.829,00	520unit	27499254.56	520unit	58331083.56	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.06	X.XX.01.1.06.09	XXX Penyelenggaraan RapatKoordinasid anKonsultasiSKP D	Jumlahperjalana ndinasdalamran gkakoordinasida nkonsultasiskpd (kali)	100kali	0kali	0,00	0kali	0,00	165kali	741.330.900,00	165kali	800.000.000,00	165kali	840.000.000,00	495kali	2.381.330.900,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.07		X.XX.01.1.07XXX PengadaanBarang MilikDaerahPenunj angUrusanPemerin tahDaerah	persentaseP emenuhanK ebutuhanBar angMilikDae rahPenunjan gUrusanPem erintahDaer ah	75%	100persen	0,00	100persen	0,00	100persen	8.146.526.766,00	100persen	3.900.000.000,00	100persen	4.550.000.000,00	100persen	16.596.526.766,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.07	X.XX.01.1.07.01	XXXPengadaanKen daraanPerorangan DinasatauKendaraa nDinasJabatan	jumlahkendaraan perorangandinas/ kendaraaninasja batanyangdiadak an (unit)	4unit	0unit	0,00	0unit	0,00	0unit	0,00	1unit	600.000.000,00	1unit	1.100.000.000,00	2unit	1.700.000.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.07	X.XX.01.1.07.02	XXXPengadaanKen daraanDinasOperasionalatauLapangan	jumlahkendaraa ndinasoperasion al/lapanganyang diadakan(unit)	14unit	0unit	0,00	0unit	0,00	0unit	0,00	1unit	300.000.000,00	1unit	300.000.000,00	2unit	600.000.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.07	X.XX.01.1.07.09	XXX PengadaanGed ung Kantoratau BangunanLainn ya	jumlahgedungk antor/banguna nlainnyayang diadakan(item)	2item	0item	0,00	0item	0,00	7item	1.053.826.960,00	4item	1.000.000.000,00	4item	1.050.000.000,00	15item	3.103.826.960,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.07	X.XX.01.1.07.10	XXXPengadaanSar anadanPrasaranaG edungKantoratauB angunanLainnya	jumlahpengada anasaranadanpr asaranagedung kantor/bangun anlainnya(item)	5item	0item	0,00	0item	0,00	10item	7.092.699.806,00	2item	2.000.000.000,00	2item	2.100.000.000,00	14item	11.192.699.806,00	Dinas Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab			
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana PD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.08		X.XX.01.1.08XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	100persen	0,00	100persen	0,00	100persen	2.744.440.360,00	100persen	3.220.000.000,00	100persen	3.381.000.000,00	100persen	9.345.440.360,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.08	X.XX.01.1.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang keluar dan masuk (surat)	500surat	0surat	0,00	0surat	0,00	600surat	105.989.500,00	700surat	120.000.000,00	800surat	126.000.000,00	2100surat	351.989.500,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.08	X.XX.01.1.08.02	XXX Penyediaan jasa komunikasi Sumbat Daya Airdan Listrik	jumlah dokumen pemenuhan jasa komunikasi, sumbat daya airdan listrik (dokumen)	24dokumen	0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	24dokumen	574.285.260,00	24dokumen	600.000.000,00	24dokumen	630.000.000,00	24dokumen	1.804.285.260,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.08	X.XX.01.1.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah orang jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan gajinya (orang)	49orang	0orang	0,00	0orang	0,00	49orang	2.064.165.600,00	49orang	2.500.000.000,00	49orang	2.625.000.000,00	49orang	7.189.165.600,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.09		X.XX.01.1.09XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	75%	100persen	0,00	100persen	0,00	100persen	784.640.000,00	100persen	1.035.000.000,00	100persen	1.061.750.000,00	100persen	2.881.390.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.09	X.XX.01.1.09.01	XXX Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	4unit	0unit	0,00	0unit	0,00	18unit	423.708.000,00	4unit	500.000.000,00	4unit	525.000.000,00	4unit	1.448.708.000,00	Dinas Perindustrian
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.09	X.XX.01.1.09.02	XXX Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	14unit	0unit	0,00	0unit	0,00	14unit	20.000.000,00	14unit	35.000.000,00	14unit	36.750.000,00	14unit	91.750.000,00	Dinas Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/S ubkegiatan	IndikatorKinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Out put)/Subkegiata n(Suboutput)	DataCapaian padaTahunA walPerencan aan	TargetKinerjaProgram/Kegiatan danSubkegiatan danKerangkaPendanaan										OPD Penanggung Jawab			
										Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023			KondisiKinerjapadaAkhirPeriodeRen straPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			0	00	X.XX.01	X.XX.01.1.09	X.XX.01.1.09.10	XXXPemeliharaanR ehabilitasiSarana danPrasaranaGedun g KantoratauBangun an Lainnya	jumlah saranadan prasaranagedu ng kantoryang dipelihara(item)	4item	0item	0,00	0item	0,00	4item	340.932.000,00	6item	500.000.000,00	6item	500.000.000,00	16item	1.340.932.000,00	Dinas Perindustrian
Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri di daerah dalam mendorong perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap adap nilai PDRB	% kontribusi sektor industri terhadap adap nilai PDRB	3	31	3.31.02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri	6%	3%	0,00	4%	0,00	5%	12.191.374.570,00	6%	13913048812.55	7%	14.180.000.000,00	7%	40284423382.55	Dinas Perindustrian
			3	31	3.31.02	3.31.02.1.01		3.31.02.1.01 Penyusunan Penetapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	persentase peningkatan industri yang di binakan	6%	0persen	0,00	0persen	0,00	3persen	12.191.374.570,00	4persen	13913048812.55	5persen	14.180.000.000,00	5persen	40284423382.55	Dinas Perindustrian
			3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	jumlah dokumen penyusunan rencana pembangunan industri yang disusun (Dokumen)	1 dokumen RPIP	0Dokumen	0,00	0Dokumen	0,00	0Dokumen	0,00	1Dokumen	200.000.000,00	1Dokumen	210.000.000,00	2Dokumen	410.000.000,00	Dinas Perindustrian
			3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.02	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen pengembangan kawasan industri yang dilaksanakan (dokumen) jumlah dokumen kebijakan industri hijau dan SNI industri yang dilaksanakan (dokumen)	2dokumen 1dokumen	0dokumen 0dokumen	0,00 0dokumen	0dokumen 0dokumen	0,00 2dokumen	1dokumen 2dokumen	284.031.700,00	1dokumen 2dokumen	350.000.000,00	1dokumen 2dokumen	350.000.000,00	3dokumen 6dokumen	984.031.700,00	Dinas Perindustrian
			3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	jumlah sumber dayamasyarakat industri yang di binakan (orang)	100orang	0orang	0,00	0orang	0,00	300orang	4.683.691.200,00	350orang	4.750.000.000,00	400orang	4.800.000.000,00	1050orang	14.233.691.200,00	Dinas Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab		
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								Industri	Jumlah potensi sumberdaya unggul andaerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri (potensi)	1 potensi	0 potensi		0 potensi		2 potensi		1 potensi		1 potensi		4 potensi		
									Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan (unit)	5 unit	0 unit		0 unit		15 unit		15 unit		15 unit		45 unit		
			3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang dibangun (sentra)	8 sentra industri	0 sentra	0,00	0 sentra	0,00	10 sentra	3.391.981.500,00	10 sentra	4.500.000.000,00	10 sentra	4.600.000.000,00	30 sentra	12.491.981.500,00	Dinas Perindustrian

			3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.05	KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan PemberdayaanIndustridan PeranSertaMasyarakat	Jumlahpelayanandanpendam pinganmasyarakatindustri terkaitmakanan,minumandankemasan(pelayanan)	3pelayanan	Opelayanan	0,00	Opelayanan	0,00	30pelayanan	3.831.670.170,00	30 pelayanan	4.000.000.000,00	30 pelayanan	4.100.000.000,00	90 pelayanan	11.931.670.170,00	Dinas Perindustrian
									Jumlahpelayanan administrasiUPTL ogam,tekstildan alatmesinpertanian(pelayanan)	100 pelayanan	Opelayanan		Opelayanan		100 pelayanan		100 pelayanan		100 pelayanan		300 pelayanan		
									Jumlahpelayanandanpendam pinganmasyarakatindustri terkaittekstil(pelayanan)	5pelayanan	Opelayanan		Opelayanan		20pelayanan		20 pelayanan		20 pelayanan		60 pelayanan		
									Jumlahpelayanandanpendam pinganmasyarakatindustri terkaitlogam(pelayanan)	50pelayanan	Opelayanan		Opelayanan		50pelayanan		50 pelayanan		50 pelayanan		150 pelayanan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab			
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	jumlah dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan industri (dokumen)	6 dokumen	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	6 dokumen	113048812.55	6 dokumen	120.000.000,00	12 dokumen	233048812.55	Dinas Perindustrian
Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan aman bagi berkembangnya industri	Meningkatnya penerapan standar industri	% Industri yang telah terstandarisasi	3	31	3.31.03			PROGRAM PENGENDALIAN ZINUSAH INDUSTRI	% Peningkatan pengendalian zinusah industri	1%	1%	0,00	1%	0,00	2%	1.090.432.650,00	2%	1391665687.5	2%	1451248971.88	0%	3933347309.38	Dinas Perindustrian
			3	31	3.31.03	3.31.03.1.01		3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri / Izin Perluasan Usaha Industri / Izin Usaha Kawasan Industri / Izin Perluasan Kawasan Industri / PKIK Kewenangan Provinsi	persentase industri yang bersertifikat / terstandarisasi	10%	0 persen	0,00	0 persen	0,00	10 persen	1.090.432.650,00	11 persen	1391665687.5	12 persen	1451248971.88	12 persen	3933347309.38	Dinas Perindustrian
			3	31	3.31.03	3.31.03.1.01	3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Industri / Izin Perluasan Kawasan Industri / PKIK Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional / Sistem Integrasi Sistem Pelayanan	jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan standar industri (Sertifikat)	120 sertifikasi	0 Sertifikat	0,00	0 Sertifikat	0,00	160 Sertifikat	907.893.900,00	200 Sertifikat	1.200.000.000,00	200 Sertifikat	1.250.000.000,00	200 Sertifikat	3.357.893.900,00	Dinas Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program / Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab			
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			3	31	3.31.03	3.31.03.1.01	3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup UI/ UIU/ UIUK dan PKI Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (UI, UIU, UIUK dan PKI) kewenangan provinsi (Dokumen)	1 dokumen pengawasan	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	7 Dokumen	182.538.750,00	8 Dokumen	191.665.687,5	9 Dokumen	201.248.971,88	9 Dokumen	575.453.409,38	Dinas Perindustrian
Mewujudkan iklim industri yang kondusif dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di industri daerah dan menarik investasi baru	Meningkatnya pengelolaan, penyediaan, penyebaran informasi industri	% Akses dan pemanfaatan informasi industri oleh masyarakat	3	31	3.31.04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	% Peningkatan pengelolaan SIINAS	1%	1%	0,00	1%	0,00	2%	391.103.730,00	3%	550.000.000,00	4%	577.500.000,00	0%	1.518.603.730,00	Dinas Perindustrian
			3	31	3.31.04	3.31.04.1.01		3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk UI/ UIU/ UIUK dan PKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	persentase peningkatan penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)	1%	0 persen	0,00	0 persen	0,00	2 persen	391.103.730,00	3 persen	550.000.000,00	4 persen	577.500.000,00	4 persen	1.518.603.730,00	Dinas Perindustrian
			3	31	3.31.04	3.31.04.1.01	3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data LainLingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah dokumen /informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS (Dokumen)	1 dokumen informasi industri	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	201.191.800,00	4 Dokumen	250.000.000,00	4 Dokumen	262.500.000,00	12 Dokumen	713.691.800,00	Dinas Perindustrian
			3	31	3.31.04	3.31.04.1.01	3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	jumlah diseminasi dan publikasi data/informasi industri provinsi melalui SIINAS (Publikasi data/informasi)	1 dokumen publikasi data/informasi	0 Publikasi data/informasi	0,00	0 Publikasi data/informasi	0,00	4 Publikasi data/informasi	97.475.930,00	4 Publikasi data/informasi	150.000.000,00	4 Publikasi data/informasi	157.500.000,00	12 Publikasi data/informasi	404.975.930,00	Dinas Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/S ubkegiatan	IndikatorKinerja Program (Outcom e)/ Kegiatan (Out put)/ Subkegiata n (Suboutput)	DataCapaian padaTahunA walPerencan aan	TargetKinerjaProgram/ Kegiatan danSubkegiatan danKerangkaPendanaan										OPD PenanggungJ awab		
											Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023			KondisiKinerjapadaAkhirPeriodeRen straPD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			3	31	3.31.04	3.31.04.1.01	3.31.04.1.01.03	Pemantauan danE valuasiKepatuhanPe rusahaanIndustrid anPerusahaanKaw asanIndustriLingku pProvinsidalamPen yampaianData keSII Nas	Jumlahdokumen pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan indust ridan kawasan ind ustri dalam penya mpaian data ke SIINAS (Dokumen)	1 dokumen p engawasan	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	92.436.000,00	4 Dokumen	150.000.000,00	4 Dokumen	157.500.000,00	12 Dokumen	399.936.000,00	DinasP erindustrian
Grandtotal											0,00		0,00	39.420.678.829,00		397.117.763.29,05		416.920.482.26,44		120.824.503.384,49			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perindustrian bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja dinas berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada sasaran yang ingin dicapai. Indikator kinerja yang ditetapkan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 disajikan pada tabel berikut :

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	% Nilai SAKIP organisasi perangkat daerah % ASN nilai SKP kategori baik Rata- rata capaian kinerja perangkat daerah (Evaluasi dokumen perencanaan) % temuan material Sasaran RPJMD Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah(1)	100 %	100 Persen 100 Persen 100 Persen 0.1 persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 0.1 persen	100 Persen 100 Persen 0.07 persen	100 Persen 100 Persen 0.05 persen	100 Persen 100 Persen 0.03 persen	100 %
2	% kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sasaran RPJMD Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah(10)	12 Persen	12 Persen	11 Persen	12.5 Persen	13 Persen	13 Persen	13 Persen
3	% Industri yang telah terstandarisasi Sasaran RPJMD Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah(10)	20 Persen	24 Persen	20 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	% Akses dan pemanfaatan informasi industri oleh masyarakat Sasaran RPJMD <i>Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah(10)</i>	1 Persen	1 Persen	1 Persen	2 Persen	2.5 Persen	3 Persen	3 Persen

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, sebagai acuan dalam melaksanakan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, dokumen Renstra Perubahan ini secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja).

Renstra Perubahan merupakan perencanaan yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholder*) dalam rangka melaksanakan pembangunan sektor industri, sehingga seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah yakni **“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER”**

Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan

H. AHMADI AKIL, SE., MM.
PANGKAT PEMBINA TK. I
NIP. 19651231 119403 1 081